

**BAB III**  
**KERANGKA EKONOMI MAKRO**

**3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.**

**3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014**

Salah satu dimensi sasaran pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dengan pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dalam periode Tahun 2013 berkisar diantara 4,17 persen. Sedangkan Tahun 2014 laju Pertumbuhan Ekonomi angka sementara sebesar 4,46 persen. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Tahun 2014 mengalami perlambatan terutama distribusi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan perikanan dan pertambangan serta penggalian. Sementara laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014 mencapai 6,06 persen. Selanjutnya rincian perbandingan pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya**  
**Dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 – 2014 (Persen)**

TAHUN	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Kabupaten Tasikmalaya	Provinsi Jawa Barat
(1)	(2)	(3)
2010	4,27	6,20
2011	4,32	6,48
2012	4,32	6,21
2013	4,17	6,21
2014	4,46	6,06

*Sumber : BPS (Hasil Penelitian)  
Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kabupaten.Tasikmalaya*

### 3.1.2 Pertumbuhan Sektoral

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang dirinci per sektor memberikan gambaran yang lebih rinci tentang pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Misalnya pada sektor: pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan galian, industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, dan keuangan, persewaan dan jasa.

Pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di Kabupaten Tasikmalaya adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan lajunya yang mencapai 7,36 persen. Kemudian sektor Industri Pengolahan dengan laju 5,53 persen, Jasa-jasa dengan laju 4,38 persen dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa dengan nilai 5,74 persen. Sedangkan sektor Pertambangan dan Pengegalian adalah sektor dengan laju yang paling rendah 1,79 persen.

Di tingkat Provinsi Jawa Barat, sektor pengangkutan dan komunikasi paling tinggi, yaitu mencapai 9,66 persen diikuti oleh sektor bangunan 8,37 persen, lalu sektor keuangan, persewaan dan jasa sebesar 8,35 persen. Laju ekonomi yang paling rendah ditunjukkan oleh sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan dengan lajunya sebesar 3,57 persen. Untuk mengetahui perbandingan pertumbuhan perekonomian antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dengan Provinsi Jawa Barat dirinci menurut sektor Tahun 2014**

Sektor	Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Kabupaten Tasikmalaya	Provinsi Jawa Barat
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan	2,49	3,57
2. Pertambangan dan Pengegalian	1,79	4,85

Sektor	Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Kabupaten Tasikmalaya	Provinsi Jawa Barat
3. Industri Pengolahan	5,53	5,41
4. Listrik, Gas dan Air Minum	4,90	7,05
5. Bangunan	4,71	8,37
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,36	7,57
7. Pengangkutan dan Komunikasi	4,87	9,66
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa	5,74	8,35
9. Jasa-jasa	4,38	5,44

Sumber : BPS (Hasil analisis)

### 3.1.3 Struktur Ekonomi

Karakteristik suatu wilayah baik dari sisi demografis, maupun urban dan rural, akan menentukan beragamnya kegiatan perekonomian wilayah tersebut, sehingga hal tersebut dapat memberikan warna pada struktur perekonomian suatu daerah. Hal ini juga karena dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia.

Sistem ekonomi yang terbentuk pada suatu wilayah dapat memberikan gambaran bagaimana struktur perekonomian di wilayah tersebut. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase PDRB sektoral.

Distribusi persentase PDRB sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Distribusi persentase juga dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam pembentukan PDRB, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi motor penggerak pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan.

Struktur Ekonomi secara kuantitatif bisa digambarkan dengan menghitung besarnya persentase peranan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor terhadap nilai total Produk Domestik regional Bruto (PDRB). Sektor pertanian masih merupakan “*core bussines*” di

Kabupaten Tasikmalaya dengan peranan lebih dari 38,23 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai andil terbesar kedua dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2014 dengan andil sebesar 28,44 persen. Sektor Jasa-jasa peranannya sebesar 11,72 persen merupakan sektor ketiga terbesar setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Untuk melihat distribusi persentase PDRB Kabupaten Tasikmalaya dan perbandingannya dengan Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat dibawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tasikmalaya dan**  
**Provinsi Jawa Barat ADH Berlaku Tahun 2014**

Sektor	Distribusi Persentase (%)	
	Kabupaten Tasikmalaya	Provinsi Jawa Barat
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan	38,23	12,42
2. Pertambangan dan Penggalian	0,20	0,32
3. Industri Pengolahan	8,63	33,46
4. Listrik, Gas dan Air Minum	0,88	2,84
5. Bangunan	1,61	4,58
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	28,44	25,40
7. Pengangkutan dan Komunikasi	6,31	8,52
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa	3,98	3,13
9. Jasa-jasa	11,72	9,33

Sumber : BPS (Hasil Sementara)

### 3.1.4 PDRB Perkapita

Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (*transfer out*) sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk (*transfer in*) maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini digunakan karena sulitnya untuk mendapatkan data pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk dan keluar. Angka PDRB per kapita

diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan Tahun.

PDRB Perkapita Kabupaten Tasikmalaya dalam periode Tahun 2013–2014 atas dasar harga berlaku secara agregat terus bertambah dan selalu tumbuh positif. Tahun 2013 PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 8.709.660,76 sedangkan Tahun 2014 Rp.9.725.112,00, dengan demikian ada pertumbuhan sebesar 11,66 persen. Selanjutnya untuk melihat perkembangan PDRB berdasarkan Kontribusi Per-sektor di Kabupaten Tasikmalaya kurun waktu 2013-2014 dapat dilihat di bawah ini :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan PDRB Per-Sektor Kabupaten Tasikmalaya**  
**Tahun 2013-2014**

Sektor	2013	2014
1. Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan	38,47	38,23
2. Pertambangan dan Penggalian	0,21	0,20
3. Industri Pengolahan	8,71	8,63
4. Listrik, Gas dan Air Minum	0,86	0,88
5. Bangunan	1,65	1,61
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	27,92	28,44
7. Pengangkutan dan Komunikasi	6,25	6,31
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa	4,05	3,98
9. Jasa-jasa	11,88	11,72

Sumber : BPS(Hasil Sementara)

### **3.1.5. Indikator Makro Pencapaian Visi dan Misi**

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya pada dasarnya diorientasikan pada upaya pencapaian visi, misi serta tujuan pembangunan. Pencapaian visi Kabupaten Tasikmalaya antara lain ditunjukkan dengan indikator pencapaian makro pembangunan yang tertuang dalam sepuluh indikator.

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh pencapaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,12 persen pada tahun 2013 dan untuk target pada Tahun 2014 sebesar 73,22 persen, angka Harapan Hidup pada Tahun 2013 mencapai sebesar 68,42

th sedangkan uantuk target tahun 2014 sebesar 68,54 th, capaian rata-rata lama sekolah pada Tahun 2013 sebesar 7,31 th dan pada Tahun 2014 ditargetkan sebesar 7,28 th. Target capaian indikator makro Kabupaten Tasikmalaya secara lengkap dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Target Indikator Makro Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Tasikmalaya**

No	IndikatorMakro	2013	2014	
		Realisasi	Target	
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,12	73.22	
	Angka Harapan Hidup (th)	68,42	68.68	
	Rata-Rata Lama Sekolah (th)	7,31	7.28	
	Angka Melek Huruf (%)	99,23	99.21	
	Daya Beli (Konsumsi/kapita/tahun) (Rp)	639.504	579,330	
	Indeks Pendidikan	82,40	82.32	
	Indeks Kesehatan	72,36	72.79	
	Indeks Daya Beli	64,59	64.56	
	2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.720.124	1,731,181
	3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,6	0.75
4	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	201.200	276.989	
	Proporsinya terhadap jumlah penduduk total (%)	11,6	16	
5	PDRB (berlaku) (Rp. Trilyun)	15,00	13.83	
6	PDRB Perkapita (berlaku) (Rp.)	8.709.660,76	7,987,454	
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (konstan 2000)	4,17	4,5 - 5,5	
8	Jumlah Penduduk yang bekerja (Jiwa)	900.177*	785,956	
9	Proporsi jumlah penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk total (%)	51,79	45.4	
10	Pengangguran Terbuka (%)	6,46	6-7	

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya adalah rencana keuangan, baik dari sisi pendapatan yang akan diperoleh maupun belanja yang akan digunakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya guna melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, implementasi otonomi dan pelayanan umum. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

APBD Kabupaten Tasikmalaya disusun dengan pendekatan kinerja, yang didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 serta kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, pokok-pokok pikiran DPRD, hasil musyawarah perencanaan pembangunan dan hasil identifikasi aspirasi masyarakat lainnya yang disampaikan, baik melalui perangkat Pemerintah maupun DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Tasikmalaya yang disepakati dirumuskan dalam Kebijakan Umum APBD serta Plafond dan Prioritas Anggaran. Penyusunan, tahapan, proses dan tata cara formulasi APBD Kabupaten Tasikmalaya mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **3.2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara, dalam upaya optimalisasi potensi-potensi pembangunan daerah untuk mencapai target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi sebuah kebijakan yang sangat penting dalam roda pemerintahan untuk menyelenggarakan pembangunan setiap Tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014 adalah rencana keuangan, baik dari sisi pendapatan yang akan diperoleh maupun belanja yang akan digunakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya guna melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, implementasi otonomi dan pelayanan umum selama Tahun 2014.

Penyusunan APBD telah disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman



Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya dijabarkan lagi untuk penyusunan APBD Tahun 2014 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam bentuk rencana keuangan Tahunan daerah yang didalamnya memuat pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD adalah merupakan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Proses penyusunan APBD Kabupaten Tasikmalaya, diawali dengan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. KUA merupakan arah kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan, sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. KUA ini merupakan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 (*satu*) Tahun ke depan, sedangkan tujuan disusunnya PPAS adalah untuk menjamin bahwa seluruh sumber daya yang ada telah teralokasikan berdasarkan program-program prioritas, terlaksana secara efektif dan efisien. Hal ini dilakukan karena adanya kesenjangan antara besarnya tuntutan masyarakat dengan kemampuan keuangan daerah.

APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014, dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 38 Tahun

2013, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014.

### **1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah**

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah), Dana Perimbangan (meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (meliputi Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya) dan Pembiayaan Daerah (meliputi penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah).

Untuk Tahun 2014, kebijakan fiskal yang merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan tetap mengupayakan stimulus fiskal dalam batas-batas yang dapat ditopang oleh sumber-sumber pembiayaan yang tersedia.

Mengacu pada tantangan-tantangan tersebut, strategi kebijakan fiskal pada Tahun 2014 akan tetap difokuskan pada langkah-langkah antara lain:

- a. Meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah
- b. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Dana Perimbangan yang lebih rasional dan proporsional;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan pokok di bidang pendapatan daerah dilakukan dengan memperbaiki kebijakan perpajakan dan retribusi di Tahun 2014. Kebijakan ini, selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Sehubungan dengan kebijakan tersebut akan dilakukan langkah-langkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif sebagai berikut:

#### **a. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah**

Secara umum kebijakan Pendapatan Asli Daerah akan dilakukan dengan meningkatkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diprediksi akan memberikan sumbangan yang berarti pada perolehan pendapatan. Untuk kebijakan perencanaan pendapatan daerah Tahun 2014 diupayakan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha. Upaya yang ditempuh adalah melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan membayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Adapun dalam rangka pelaksanaan peningkatan penerimaan daerah dari pos PAD, telah dilaksanakan program kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi yang mendukung pencapaian PAD Tahun anggaran 2014, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyempurnaan Peraturan Daerah;
- 2) Sosialisasi;
- 3) Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah;
- 4) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi;
- 5) Penagihan tunggakan pajak daerah;
- 6) Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB sebagai pajak daerah;
- 7) Optimalisasi Pemungutan/penagihan;
- 8) Penetapan Skala Prioritas Pencapaian target Pendapatan;
- 9) Pemeliharaan Basis data PBB dan penyiapan peralihan PBB sebagai pajak daerah;
- 10) Monitoring dan evaluasi Pencapaian Target Pendapatan.

#### **b. Kebijakan Dana Perimbangan**

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perolehan penerimaan Dana Perimbangan dilakukan melalui penyempurnaan data teknis sebagai dasar penentuan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat serta upaya lainnya.

#### **c. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pemerintah daerah berupaya untuk memperoleh alokasi dana penyesuaian, hibah maupun bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.

## **2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah**

Pada struktur APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 atau ringkasan perubahan APBD Tahun anggaran 2014, pendapatan Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Adapun target Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 secara keseluruhan sebesar Rp 2.554.080.535.809,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.575.127.886.182,00 atau 100,82 persen.

Realisasi PAD pada Tahun 2014 telah melampaui target yang diharapkan, dengan pencapaian realisasi sebesar Rp 162.863.531.304,00 dari target sebesar Rp 152.337.814.551 atau mencapai 106,91 persen, hal ini tidak terlepas dari pelimpahan Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2) menjadi Pajak Daerah.

Pada Tahun 2014 untuk Dana Perimbangan realisasinya sebesar Rp 1.541.035.901.962,00 dari target sebesar Rp 1.521.840.482.635,00 atau 101,26 persen. Sedangkan untuk realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, realisasinya sebesar Rp 871.228.452.916,00 dari target sebesar Rp 879.902.238.623,00 atau 99,01 persen.

PAD menyumbang 6,32 persen dari total realisasi pendapatan Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2014, selain pengaruh telah dilimpahkannya Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2), juga sebagai pengaruh dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan untuk Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 59,84 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 33,83%.

Kontribusi PAD Kabupaten Tasikmalaya 6,32 persen ini relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata rasio PAD terhadap Pendapatan (Provinsi, Kabupaten, Kota) sebesar 18,08 persen, artinya bahwa kemampuan/kemandirian daerah masih tergantung dari dana Pusat.

Mengingat bahwa kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk memungut pajak daerah bersifat terbatas (*closed list*) dan sumber penerimaan pajak daerah yang berlaku saat ini cenderung bias ke daerah yang tingkat urbanisasinya tinggi (*urban-biased*), seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame, menyebabkan untuk daerah yang

perkotaannya tidak terlalu tinggi seperti Kabupaten Tasikmalaya, potensi penerimaan pajaknya menjadi kecil.

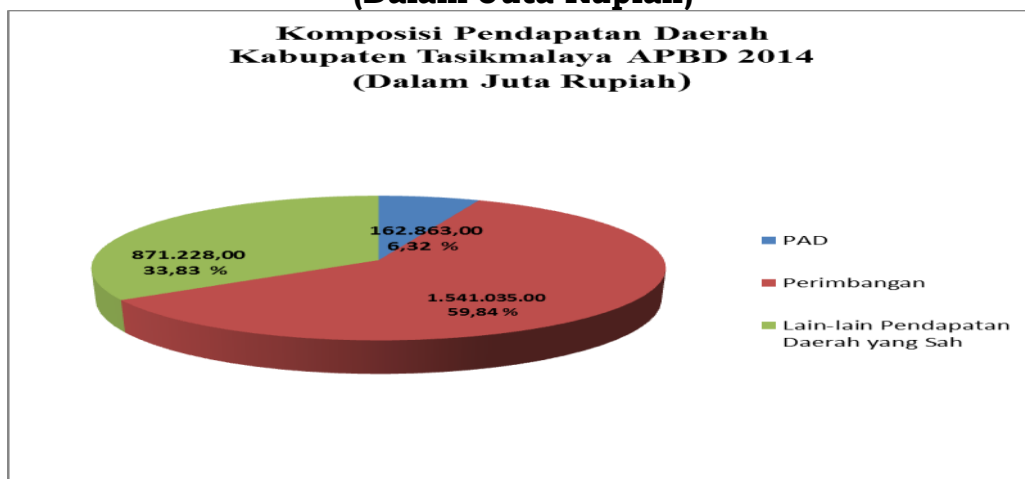
Pendapatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 jika dibandingkan dengan pendapatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 terdapat peningkatan dari Rp. 2.213.623.318.967,00 menjadi Rp. 2.575.127.886.182,00 atau 116,33 persen.

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi ( Rp)</b>	<b>%</b>
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2.554.080.535.809,00</b>	<b>2.575.127.886.182,00</b>	<b>100,82</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>152.337.814.551,00</b>	<b>162.863.532.004,00</b>	<b>106,91</b>
Pajak Daerah	41.595.013.937,00	44.253.007.592,00	<b>106,39</b>
Retribusi Daerah	20.434.553.250,00	33.530.262.672,00	<b>164,09</b>
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	18.118.326.734,00	18.835.852.511,00	<b>103,96</b>
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	72.189.920.630,00	66.244.408.529,00	<b>91,76</b>
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.521.840.482.635,00</b>	<b>1.541.035.901.962,00</b>	<b>101,26</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	68.593.994.635,00	87.789.413.962,00	<b>127,98</b>
Dana Alokasi Umum	1.342.934.278.000,00	1.342.934.278.000,00	<b>100,00</b>
Dana Alokasi Khusus	110.312.210.000,00	110.312.210.000,00	<b>100,00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>879.902.238.623,00</b>	<b>871.228.452.916,00</b>	<b>99,01</b>
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	82.513.372.623,00	90.983.601.513,00	<b>110,27</b>
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	411.137.653.000,00	411.137.653.000,00	<b>100,00</b>
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	386.251.213.000,00	369.107.198.403,00	<b>95,56</b>

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya, 2014

**Gambar 3.1**  
**Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya APBD 2014**  
**(Dalam Juta Rupiah)**



*Sumber: DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya, 2014*

### 3.2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

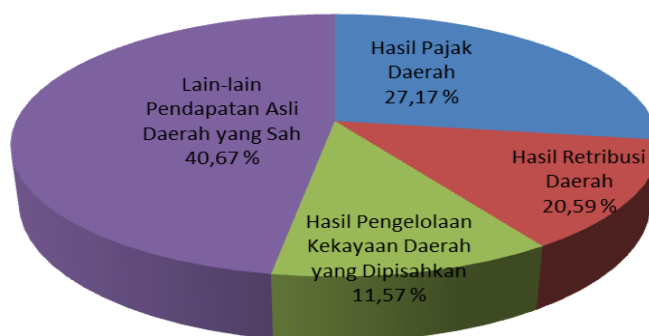
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2014 telah melampaui target yang ditetapkan, yakni dari target sebesar Rp 152.337.814.551,00 terealisasi sebesar Rp 162.863.531.304 atau 106,91 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah.

**Tabel 3.7**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>152.337.814.551,00</b>	<b>162.863.531.304,00</b>	<b>106,91</b>
Pajak Daerah	41.595.013.937,00	44.253.007.592,00	<b>106,39</b>
Retribusi Daerah	20.434.553.250,00	33.530.262.672,00	<b>164,09</b>
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	18.118.326.734,00	18.835.852.511,00	<b>103,96</b>
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	72.189.920.630,00	66.244.408.529,00	<b>91,76</b>

*Sumber: DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya, 2014*

**Gambar 3.2**  
**Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD )**  
**Kabupaten Tasikmalaya APBD TA. 2014**



*Sumber: DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya, 2014*

Hampir seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah melebihi dari target yang telah ditetapkan, untuk komponen Retribusi Daerah melebihi 164,09 persen, namun untuk Komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak tercapai, hanya 91,76 persen. Hal ini diantaranya dikarenakan Bagi Hasil dari Pajak Rokok hanya terealisasi 84,91 persen. Target meleset karena Realisasi Bulan Desember 2014 dialokasikan pada TA. 2015 serta dari sub koding Bantuan Keuangan dari Provinsi yang terealisasi sebesar 95,56 persen. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 6.125.000.000,00, adanya sisa lelang sebesar Rp 9.649.564.597,00, sisa anggaran dari kegiatan fasilitasi peningkatan kinerja Dokter dan bidan sebesar Rp 1.467.200.000,00, sisa anggaran operasional penyuluh Rp 2.250.000,00 serta kesalahan pengiriman ke Kas Daerah kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp 100.000.000,00.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Tahun 2014 meningkat sebesar Rp 92.389.339.189,00 atau sebesar 131,10 persen apabila dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya. Adanya peningkatan PAD yang cukup signifikan, tidak terlepas dari pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya APBD Tahun



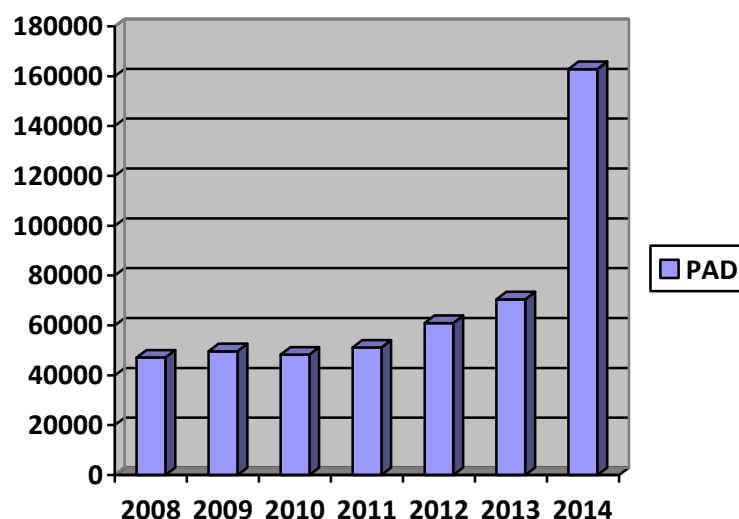
Anggaran 2013-2014 dapat dilihat di Tabel 3.8 dan Gambar 3.3, dibawah ini.

**Tabel 3.8**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kabupaten Tasikmalaya APBD TA. 2011-2014**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI		PENINGKATAN REALISASI	%
			Rp.	%		
1	2011	52.511.188.055,12	51.160.921.192	97,43	2.822.859.671	5,84
2	2012	58.135.672.163,93	60.970.810.517	104,88	9.809.889.325	19,17
3	2013	70.232.926.830,00	70.474.192.115	100,34	9.503.381.598	15,59
4	2014*	152.337.814.551,00	162.863.531.304	106,91	92.389.339.189	131,10

*Sumber: DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya, 2014*

**Gambar 3.3**  
**Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013-2014**  
**(Juta Rupiah)**



*Sumber: DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya, 2014*

Secara umum porsi terbesar PAD berasal dari Lain-lain PAD yang Sah sebesar 40,67 persen diikuti oleh Hasil Pajak Daerah 27,17 persen, Hasil Retribusi Daerah 20,59 persen serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 11,57 persen. Selanjutnya rincian Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014 dapat di lihat pada Tabel 3.9 di bawah ini.

**Tabel 3.9**  
**Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kabupaten Tasikmalaya APBD TA. 2014**

URAIAN	PROPORSI (%)
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>100</b>
Hasil Pajak Daerah	27,17
Pajak Hotel	0,15
Pajak Restoran	0,96
Pajak Hiburan	0,12
Pajak Reklame	0,38
Pajak Penerangan Jalan	13,46
Pajak Parkir	0,05
Pajak Air Bawah Tanah	0,01
Pajak Sarang Burung Walet	0,002
Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan	0,24
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2	10,83
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,97
Hasil Retribusi Daerah	20,59
Retribusi Jasa Umum	18,48
Retribusi Jasa Usaha	1,46
Retribusi Perijinan Tertentu	0,64
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,57
Bagian Laba Atas Penyetaan Modal pada Perusahaan Daerah/ BUMD	11,57
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	40,67

*Sumber: DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya, 2014*

### **3.2.3. Dana Perimbangan**

Penerimaan dana perimbangan Pada Tahun 2014 terealisasi sebesar Rp 1.541.035.901.962,00 dari target sebesar Rp 1.521.840.482.635 atau melebihi sebesar 101,26 persen. Berdasarkan Komposisi Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan kontribusi paling besar yakni sebesar 87,14 persen, sedangkan Dana Alokasi Khusus sebesar 7,16 persen dan Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 5,70 persen. Selanjutnya rincian target dan

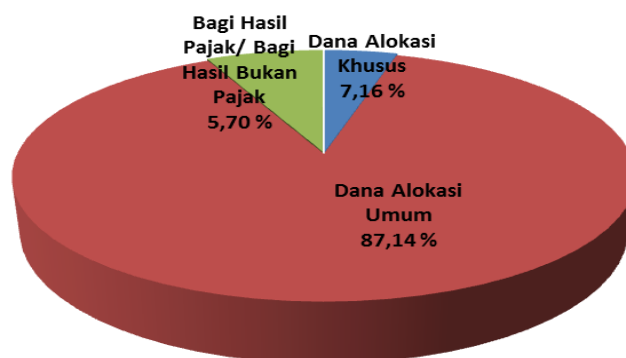
realisasi serta komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat di Tabel 3.10 dan Gambar 3.4 di bawah ini :

**Tabel 3.10**  
**Target dan Realisasi Dana Perimbangan**  
**Kabupaten Tasikmalaya APBD TA. 2014**

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Dana Perimbangan	1.521.840.482.635,00	1.541.035.901.962,00	101,26
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	68.593.994.635,00	87.789.413.962,00	127,98
Dana Alokasi Umum	1.342.934.278.000,00	1.342.934.278.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	110.312.210.000,00	110.312.210.000,00	100,00

*Sumber: DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya, 2014*

**Gambar 3.4**  
**Komposisi Dana Perimbangan**  
**Kabupaten Tasikmalaya APBD TA. 2014**



*Sumber: DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya, 2014*

Penerimaan dari Dana Perimbangan Tahun 2014 meningkat sebesar Rp 125.719.024.300,00 atau 8,88 persen dibandingkan Anggaran Tahun 2013, kenaikan ini dikarenakan adanya koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat. Selanjutnya target dan realisasi serta perkembangan realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Tasikmalaya

Tahun 2013-2014 dapat dilihat di Tabel 3.11 dan Gambar 3.5 di bawah ini:

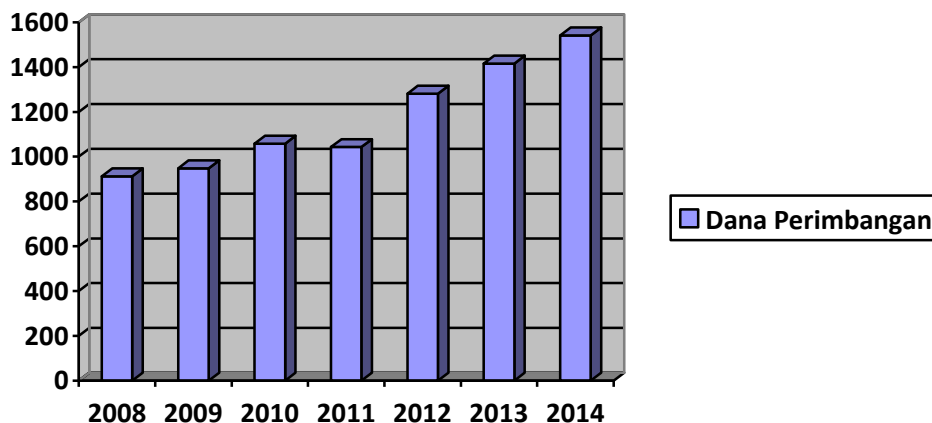
**Tabel 3.11**  
**Target dan Realisasi Dana Perimbangan**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013-2014**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI		PENINGKATAN REALISASI	%
			Rp.	%		
1	2008	911.355.295.767,00	912.656.608.607,00	100,14		
2	2009	936.590.768.557,00	948.170.972.648,00	101,24	35.514.364.041,00	3,89
3	2010	1.056.722.200.438,00	1.058.189.564.045,00	100,14	110.018.591.397,00	11,60
4	2011	1.032.163.622.295,15	1.043.973.470.058,00	101,14	(14.216.093.987,00)	-1,34
5	2012	1.280.253.484.802,00	1.281.237.193.766,00	100,08	237.263.723.708,00	22,73
6	2013	1.405.681.690.942,00	1.415.316.877.662,00	100,69	134.079.683.896,00	10,46
7	2014*	1.521.840.482.635,00	1.541.035.901.962,00	101,26	125.719.024.300,00	8,88

\*Realisasi Sebelum Audit BPK

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya, 2014

**Gambar 3.5**  
**Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013-2014**  
**(Juta Rupiah)**



Sumber: DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya, 2014

Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), komposisi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2014 terdiri dari:

### 1). Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

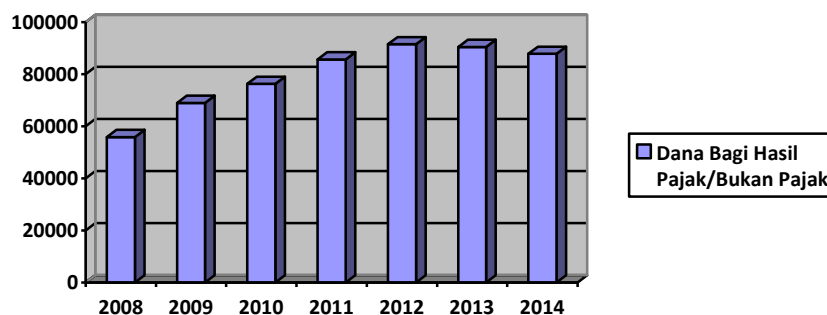
Bagi hasil Pajak/bukan pajak pada Tahun 2014 menurun sebesar Rp 2.595.214.700,00 atau 2,87 persen dibandingkan anggaran Tahun 2013. Hal ini karena pendapatan DBH berdasar realisasi Pajak pusat yaitu PPH, PPN, *Land Rent*, Royalti dan lain-lain. Selanjutnya target dan realisasi serta perkembangan realisasi Dana Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013-2014 dapat dilihat di Tabel 3.12 dan Gambar 3.6 di bawah ini :

**Tabel 3.12**  
**Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008-2014**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI		PENINGKATAN REALISASI	%
			Rp.	%		
1	2008	54.484.935.767,00	55.786.244.607,00	102,39		
2	2009	57.341.325.557,00	68.921.529.648,00	120,20	13.135.285.041,00	23,55
3	2010	74.772.591.238,00	76.259.954.845,00	101,99	7.338.425.197,00	10,65
4	2011	73.792.484.295,15	85.602.332.058,00	116,00	9.342.377.213,00	12,25
5	2012	90.482.752.802,00	91.466.461.766,00	101,09	5.864.129.708,00	6,85
6	2013	80.749.441.942,00	90.384.628.662,00	111,93	(1.081.833.104,00)	-1,18
7	2014*	68.593.994.635,00	87.789.413.962,00	127,98	(2.595.214.700,00)	-2,87

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya 2014

**Gambar 3.6**  
**Perkembangan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013-2014**  
**(Juta Rupiah)**



Sumber: DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya, 2014

### 3.2.4. Dana Alokasi Umum (DAU)

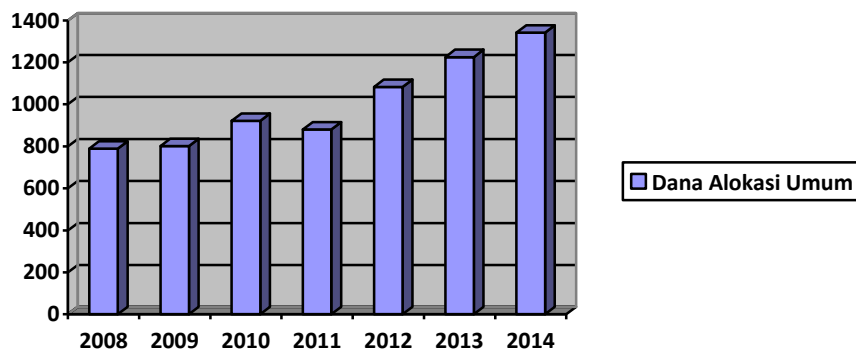
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2014 meningkat cukup signifikan yaitu sebesar Rp 116.999.399.000,00 atau meningkat sebesar 9,54 persen dibandingkan anggaran Tahun 2013. Selanjutnya mengenai target dan realisasi serta perkembangan realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Tasikmalaya APBD Tahun 2013-2014 dapat dilihat di Tabel 3.13 dan Gambar 3.7 di bawah ini :

**Tabel 3.13**  
**Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)**  
**Kabupaten Tasikmalaya APBD Tahun 2013-2014**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI		PENINGKATAN REALISASI	%
			Rp.	%		
1	2008	789.565.360.000,00	789.565.364.000,00	100,00		
2	2009	801.713.443.000,00	801.713.443.000,00	100,00	12.148.079.000,00	1,54
3	2010	921.404.109.200,00	921.384.109.200,00	100,00	119.670.666.200,00	14,93
4	2011	881.513.538.000,00	881.513.538.000,00	100,00	(39.870.571.200,00)	-4,33
5	2012	1.083.660.482.000,00	1.083.660.482.000,00	100,00	202.146.944.000,00	22,93
6	2013	1.225.934.879.000,00	1.225.934.879.000,00	100,00	142.274.397.000,00	13,13
7	2014*	1.342.934.278.000,00	1.342.934.278.000,00	100,00	116.999.399.000,00	9,54

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya, 2014

**Gambar 3.7**  
**Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Umum**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013-2014**  
**(Juta Rupiah)**



Sumber: DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya 2014

### 3.2.5. Dana Alokasi Khusus (DAK)

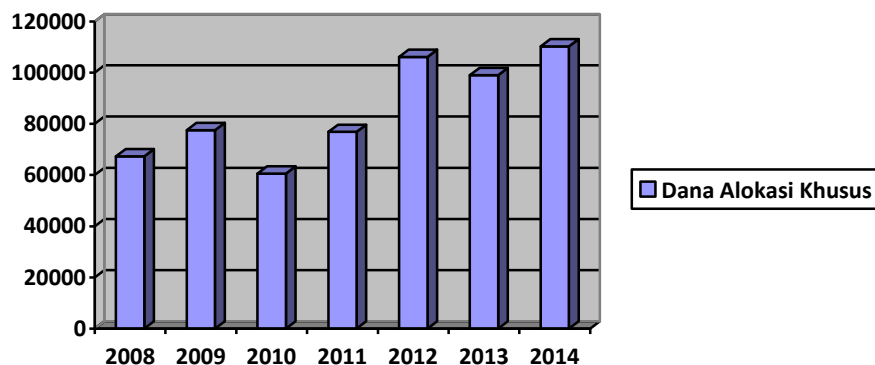
**Tabel 3.14**  
**Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	
			Rp.	%
1	2008	67.305.000.000,00	67.305.000.000,00	100,00
2	2009	77.536.000.000,00	77.536.000.000,00	100,00
3	2010	60.545.500.000,00	60.545.500.000,00	100,00
4	2011	76.857.600.000,00	76.857.600.000,00	100,00
5	2012	106.110.250.000,00	106.110.250.000,00	100,00
6	2013	98.997.370.000,00	98.997.370.000,00	100,00
7	2014*	110.312.210.000,00	110.312.210.000,00	100,00

*Ket : \* Realisasi Sebelum Audit BPK*

Dana alokasi khusus (DAK) tahun 2014 mengalami Peningkatan sebesar Rp. 1.131.484.000.000 atau 89,77 % dari anggaran tahun 2013.

**Gambar 3.8**  
**Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Khusus**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008-2014**  
**(Juta Rupiah)**



### 3.2.6. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

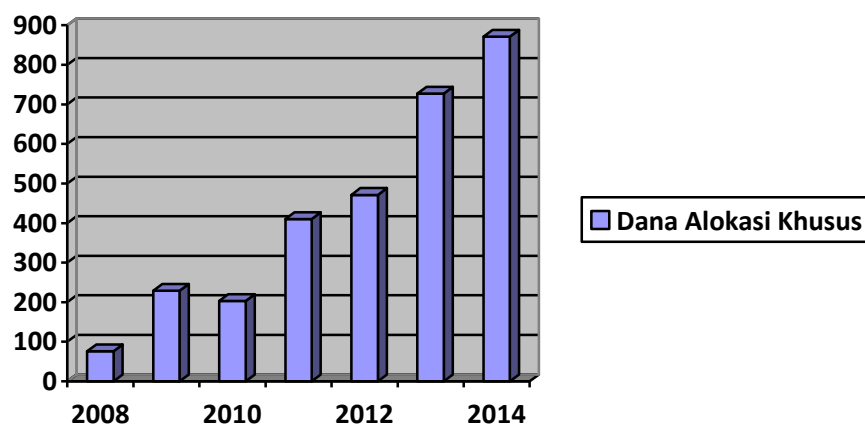
**Tabel 3.15**  
**Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	
			Rp.	%
1	2008	72.077.888.079,00	76.904.862.112,00	106,70
2	2009	201.636.318.707,00	229.250.956.221,00	113,70
3	2010	206.773.363.952,12	203.000.614.393,00	98,18
4	2011	414.290.306.197,25	410.351.565.979,00	99,05
5	2012	477.541.881.821,75	471.181.746.709,00	98,67
6	2013	752.967.390.038,00	727.832.249.190,00	96,66
7	2014*	879.902.238.623,00	871.228.452.916,00	99,01

Ket : \* Realisasi Sebelum Audit BPK

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp. 14.339.620.372.600 atau mencapai 83,54 %.

**Gambar 3.9**  
**Perkembangan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008-2014 (Milyar Rupiah)**





### **3.2.7. Permasalahan dan solusi Pendapatan Daerah**

Secara umum permasalahan utama pendapatan daerah di Kabupaten Tasikmalaya adalah belum optimalnya penggalan potensi sumber pendapatan daerah baik dari sektor sumber daya alam maupun dari sektor potensi lainnya. Sementara *collection rate* penerimaan yang berlaku di Kabupaten Tasikmalaya relatif kecil bila dibanding dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya, karena adanya perbedaan nilai strategis lokasi, serta belum optimalnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi terhadap PAD.

Permasalahan tersebut diatas, tentunya perlu diupayakan pemecahannya baik melalui suatu kajian penelitian, regulasi maupun langkah riil serta menciptakan sektor-sektor strategis untuk mendongkrak penerimaan pendapatan.

## **3.3 Pengelolaan Belanja Daerah**

### **3.3.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 dan disepakati bersama dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2014.

Berdasarkan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2014, kebijakan belanja secara umum mengalami proyeksi kenaikan seiring dengan tuntutan terhadap kebutuhan dan prioritas program/kegiatan sebagai upaya pencapaian target-target pembangunan serta terdapatnya proyeksi kenaikan pendapatan daerah pada Tahun 2014.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengarahkan pengalokasian belanja sesuai kebijakan umum anggaran yang telah disepakati bersama dengan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan belanja APBD Kabupaten Tasikmalaya, ditetapkan target capaian keluaran maupun dampak program/kegiatan pada satuan kerja pelaksana urusan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengelompokkan belanja menjadi belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal, dan belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada desa dan belanja tidak terduga. Akan tetapi pada hakikatnya kedua kelompok belanja tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian target pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah ditetapkan bersama dalam dokumen perencanaan daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja/prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2014 diarahkan untuk:

**a. Belanja Tidak Langsung**

**1). Belanja Pegawai**

- a) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam perhitungan DAU Tahun Anggaran 2014 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang direncanakan pemerintah serta penerusan pemberian gaji ketiga belas sebagaimana disampaikan dalam dokumen kerangka ekonomi makro mengenai pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun 2014.
- b) Menganggarkan penerimaan CPNS dari kategori 2 sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat, yakni sekitar 30 persen dari jumlah kuota kategori 2 yang memenuhi syarat di Kabupaten Tasikmalaya.
- c) Dalam upaya efisiensi dan efektivitas belanja pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, pada Tahun 2014 tidak menganggarkan kebutuhan belanja penerimaan CPNS dari umum dan tidak menerima mutasi dari luar Kabupaten Tasikmalaya.
- d) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, kenaikan tunjangan keluarga, dianggarkan dengan perhitungkan *acress* (cadangan kenaikan) yang besarnya dibatasi maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan).
- e) Dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur, diberikan tambahan penghasilan bagi PNSD/CPNSD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- f) Dianggarkan pula iuran asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam

Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah.

## **2) Belanja Bunga**

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014 tidak dianggarkan belanja bunga.

## **3) Belanja Subsidi**

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014 tidak dianggarkan belanja subsidi.

## **4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

- a) Pemberian hibah dan bantuan sosial mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Permendagri 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- b) Dalam menentukan lembaga, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang akan diberikan hibah dan bantuan sosial dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

- c) Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, penentuan jumlah alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dibatasi sesuai kemampuan anggaran dengan penetapan calon penerima dan calon lokasi (CPCL) yang jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping itu sesuai peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” di atas dianggarkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan pagu lebih rendah dari bantuan sosial yang direncanakan.

### **5) Belanja Bagi Hasil**

Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi atau pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya disesuaikan dengan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2014, sedangkan apabila terjadi pelampauan target Tahun Anggaran 2013 yang belum direalisasikan yang menjadi hak kabupaten atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

Penganggaran belanja bagi hasil berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 06/PMK.07/2012 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Kecamatan dan Desa di Kabupaten Tasikmalaya.

### **6) Belanja Bantuan Keuangan**

Pada Tahun 2014, bantuan keuangan ditargetkan sebesar Rp 90.001.410.962,00 dengan realisasi Rp 87.295.702.222,00 atau 96,99 persen. Bantuan Keuangan terdiri dari:

- a) Bantuan keuangan kepada desa diberikan dalam rangka menunjang fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk percepatan/akselerasi pembangunan desa, yang penetapan alokasi serta besaran untuk setiap desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dengan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- b) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan dan terealisasi sebesar Rp 822.332.222,00 mengacu pada hasil penghitungan pemilu legislatif Tahun 2009 yang penganggaran, pelaksanaan dan pencairannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **7) Belanja Tidak Terduga**

Dalam penyusunan APBD Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp 7.050.000.000,00 yang merupakan hasil penghitungan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2013 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, telah terealisasi sebesar Rp 6.617.413.000,00 atau 93,86 persen.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, keadaan darurat dan kemendesakan lainnya dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014, yang kriterianya ditetapkan dalam Perda tentang APBD dan mekanisme penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabannya mengacu pada peraturan-perundangan yang berlaku.

## **b. Belanja Langsung**

Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2014, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alokasi belanja langsung dalam APBD mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 2) Penyusunan anggaran belanja dalam setiap kegiatan, berdasarkan pedoman standar belanja dan standar harga.

Belanja langsung pada Tahun Anggaran 2014 meliputi;

### **1). Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp 76.107.736.649,00 dengan realisasi Rp 67.675.935.491,00 atau 88,92 persen. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai pada pos Belanja Langsung sebagai anggaran honorarium bagi PNS dan Non-PNS selaku pegawai yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.

### **2). Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa dialokasikan sebesar Rp 240.238.125.327,00 dengan realisasi Rp 217.060.458.240,00 atau 90,35 persen. Belanja Barang dan Jasa pada Tahun anggaran 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume

pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2013.

- b) Penganggaran untuk honorarium narasumber/tenaga ahli, uang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan pengadaan barang (termasuk berupa asset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada Tahun anggaran 2014, dialokasikan pada belanja barang dan jasa.
- c) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah dilakukan secara selektif, melalui pembatasan frekuensi dan jumlah hari serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.
- d) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya, serta dilakukan sesuai dengan kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel.
- e) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya terkait dengan peningkatan SDM harus dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperolehnya disesuaikan dengan kebutuhan lembaga.

### **3). Belanja Modal**

Belanja Modal dalam APBD Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 598.397.546.675,00 dengan realisasi Rp 558.496.505.928,00 atau 93,33 persen. Proporsi Belanja Modal akan diarahkan untuk prioritas program/kegiatan antara lain:

- a) Program Penanggulangan Kemiskinan antara lain melalui kegiatan: Operasi Katarak, Operasi Bibir Sumbing, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Tambahan Subsidi Gizi bagi Anak Yatim dan Anak Terlantar serta Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi



Keluarga Miskin, Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Budidaya Ikan, Pengembangan Sapi Potong, Ternak Domba dan Unggas.

- b) Peningkatan Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan melalui kegiatan: Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP, Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Paket C, Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat serta Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah.
- c) Peningkatan Mutu dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan melalui kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Rehabilitasi PUSTU (DAK), Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, pengadaan alat kesehatan, Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan.
- d) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Program pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan, Program Peningkatan Kesejahteraan, Program Potensi Sumber Daya Hutan, Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana pertanian.
- e) Pembangunan/peningkatan jalan Desa melalui: Bantuan Pengadaan Aspal Desa serta Pembangunan Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak.
- f) Listrik Masuk Desa melalui kegiatan: Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan serta Bantuan Sambungan Listrik bagi Rumah Tangga Miskin.
- g) Irigasi, Air Bersih Perdesaan dan Sanitasi Lingkungan Perdesaan melalui kegiatan: Pembangunan Air Bersih Perdesaan; Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK; dan Pembangunan Sumur Pantek.
- h) Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) melalui Program Keluarga Berencana (KB) dengan kegiatan: Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi), Pelayanan KB Keliling, Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja, Pemberdayaan Kader Posyandu dan Pos KB Desa.
- i) Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah melalui kegiatan: Peningkatan Jalan Kabupaten, Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan serta Penggantian Jembatan.

- j) Peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diarahkan untuk kegiatan: Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Dasar Perdesaan (jalan dan irigasi desa); Penguatan Kelembagaan di Perdesaan (Posyandu, P3A Mitra Cai) serta penunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- k) Akselerasi Penyelesaian Pembangunan Ruas Jalan Ciawi Singaparna melalui Kebijakan Pembiayaan Tahun Jamak pada T.A 2014 sebesar Rp. 25 Milyar.

### **3.3.2. Target dan Realisasi Belanja**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung meliputi: Belanja Pegawai; Belanja Hibah; Belanja Bantuan Sosial; Belanja Bagi Hasil KPD Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa; Belanja Keuangan KPD Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa; Belanja Tidak Terduga.
- b. Belanja Langsung meliputi: Belanja Pegawai; Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal untuk Program dan Kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pada Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Belanja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dianggarkan sebesar Rp 2.690.310.110.913,00 dengan realisasi Rp 2.416.942.284.557,00 atau 89,84 persen. Dalam kurun waktu 2013-2014 Belanja Daerah mengalami peningkatan yang signifikan.

Komposisi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2014 sebagian besar kontribusinya berasal dari Belanja Tidak Langsung dengan Realisasi sebesar Rp 1.573.709.384.898,00 atau 65,11 persen, sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp 843.232.899.659,00 atau 34,89 persen. Selanjutnya Komposisi Realisasi Belanja Daerah

Kabupaten Tasikmalaya APBD T.A. 2014 dapat dilihat di Tabel 3.16, Tabel 3.17 dan Gambar 3.10, dan Gambar 3.11 di bawah ini :

**Tabel 3.16**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014**  
**(Juta Rupiah)**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PROPORSI (%)
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.690.310.110.913,00</b>	<b>2.416.942.284.557,00</b>	<b>89,84</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.775.566.702.261,80</b>	<b>1.573.709.384.898,00</b>	<b>88,63</b>
Belanja Pegawai	1.514.346.764.619,20	1.322.037.197.036,00	87,30
Belanja Hibah	143.561.790.000,00	141.725.000.000,00	98,72
Belanja Bantuan Sosial	13.260.500.000,00	8.963.200.000,00	67,59
Belanja Bagi Hasil KPD Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	7.346.245.680,60	7.070.872.640,00	96,25
Belanja Keuangan KPD Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	90.001.401.962,00	87.295.702.222,00	96,99
Belanja Tidak Terduga	7.050.000.000,00	6.617.413.000,00	93,86
<b>Belanja Langsung</b>	<b>914.743.408.651,20</b>	<b>843.232.899.659,00</b>	<b>92,18</b>
Belanja Pegawai	76.107.736.649,00	67.675.935.491,00	88,92
Belanja Barang dan Jasa	240.238.125.327,00	217.060.458.240,00	90,35
Belanja Modal	598.397.546.675,20	558.496.505.928,00	93,33

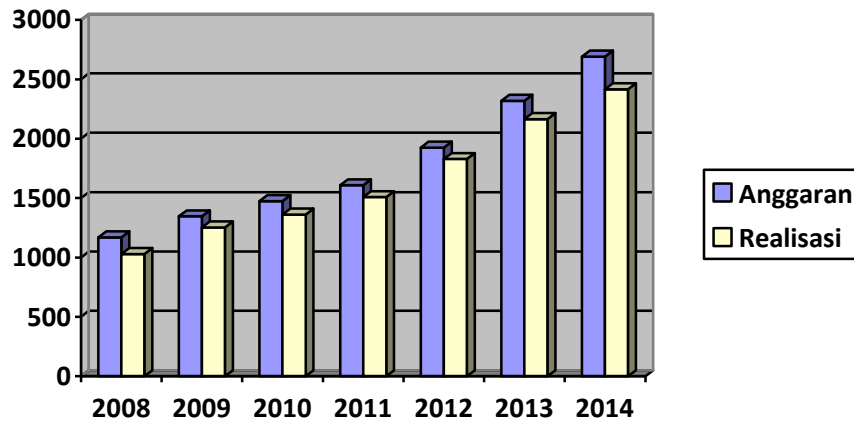
Sumber: DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya, 2014

**Tabel 3.17**  
**Target dan Realisasi Belanja**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008-2014**  
**(Juta Rupiah)**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI		PENINGKATAN REALISASI	%
			Rp.	%		
1	2008	1.169.020.242.762,00	1.030.497.101.869,00	88,15		
2	2009	1.346.966.049.184,00	1.253.770.095.370,00	93,08	223.272.993.501,00	21,67
3	2010	1.475.450.894.021,74	1.362.716.080.298,00	92,36	108.945.984.928,00	8,69
4	2011	1.608.911.733.302,52	1.508.879.721.149,00	93,78	146.163.640.851,00	10,73
5	2012	1.925.294.175.147,68	1.829.410.194.201,00	95,02	320.530.473.052,00	21,24
6	2013	2.318.155.621.192,00	2.165.004.333.289,00	93,39	335.594.139.088,00	18,34
7	2014*	2.690.310.110.913,00	2.416.942.284.557,00	89,84	251.937.951.268,00	11,64

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya, 2014

**Gambar 3.10**  
**Perkembangan Anggaran dan Realisasi Belanja**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013-2014**  
**(Juta Rupiah)**

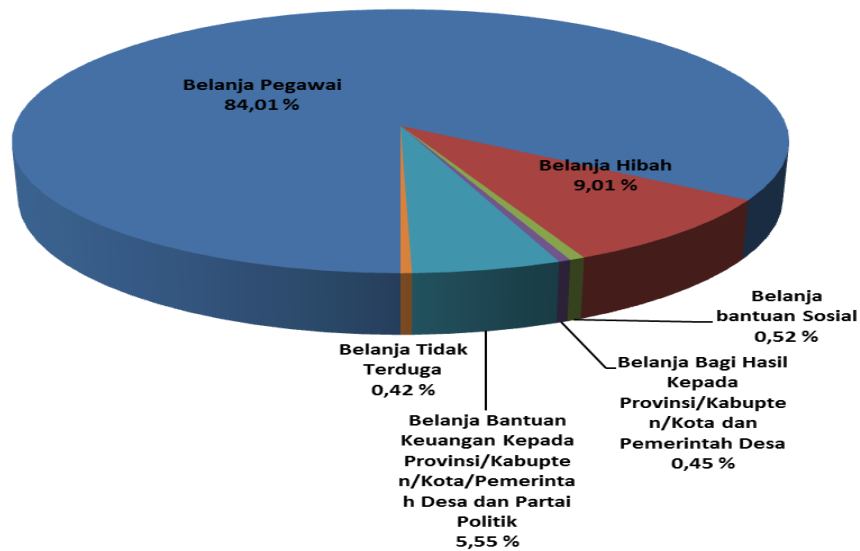


*Sumber: DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya, 2014*

**a. Belanja Tidak Langsung**

Berdasarkan Data yang dihimpun pada Komposisi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2014 dari Realisasi sebesar Rp 1.573.709.384.898,00 terdiri dari Belanja Pegawai dengan realisasi sebesar Rp 1.322.037.197.036,00 atau 84,01 persen. Berurutan diikuti oleh Belanja Hibah sebesar Rp 141.725.000.000 atau 9,01 persen; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik sebesar Rp 87.295.702.222 atau 5,55 persen; Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 8.963.200.000.000 atau 0,52 persen; Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp 7.070.872.640,00 atau 0,45 persen serta Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 6.617.413.000,00 atau 0,42 persen. Selanjutnya Komposisi Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat di Gambar 3.11 di bawah ini :

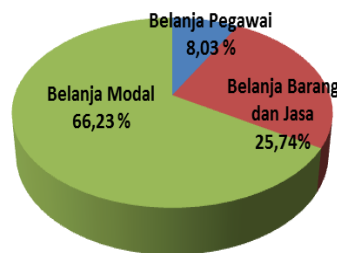
**Gambar 3.11**  
**Komposisi Realisasi Belanja Tidak Langsung**  
**Kabupaten Tasikmalaya APBD Tahun 2014**



**b. Belanja Langsung**

Komposisi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014 dari Realisasi sebesar Rp 843.232.899.659,00 terdiri dari Belanja Pegawai realisasinya sebesar Rp 67.675.935.491,00 atau 8,03 persen. Belanja Barang dan Jasa Rp 217.196.925.953,00 atau 25,74 persen, paling besar dari Belanja Modal sebesar Rp 558.496.505.928,00 atau 66,23 persen, selanjutnya Komposisi Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Tasikmalaya APBD T.A. 2014 dapat dilihat di Gambar 3.12 di bawah ini :

**Gambar 3.12**  
**Komposisi Realisasi Belanja Langsung**  
**Kabupaten Tasikmalaya APBD Tahun 2014**



Sumber: DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya, 2014

### **3. Permasalahan dan Solusi Belanja Daerah**

Pada dasarnya permasalahan umum yang dihadapi daerah saat ini terkait belanja daerah, adalah pemerintah daerah seringkali dihadapkan akan tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal. Sementara di sisi lain masyarakat menuntut adanya perbaikan kualitas pelayanan dimana hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam merealisasikannya.

Dalam menghadapi situasi ini diperlukan solusi sebagai upaya pemecahan permasalahan, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- 1). Menetapkan skala prioritas belanja daerah dalam menghadapi begitu banyaknya kebutuhan yang memerlukan pembiayaan yang besar;
- 2). Memilih aktivitas ataupun kegiatan yang dapat memberikan umpan balik dan dampak positif bagi peningkatan sektor pembangunan lain;
- 3). Menetapkan standar analisa belanja yang pada saat ini masih dalam bentuk standar harga barang dan jasa yang menjadi acuan atau batas tertinggi dalam penganggaran belanja daerah;
- 4). Pengendalian dan pengukuran untuk alokasi anggaran masing-masing kegiatan untuk menilai kewajaran pembebanan biaya dalam pelaksanaan kegiatan;
- 5). Merealisasikan anggaran belanja sesuai kebutuhan riil karena tidak selamanya belanja yang telah dianggarkan harus dihabiskan.

#### **A. Pengelolaan Pembiayaan Daerah**

Pos pembiayaan pada RAPBD Tahun 2014 terdiri dari pos penerimaan pembiayaan yang terdiri dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2013 dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah serta pengalokasian dana cadangan yang masing-masing telah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan serta tuntutan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah berdampak pada meningkatnya belanja daerah, sehingga dengan kondisi pendapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan belanja tersebut mengakibatkan kondisi RAPBD dalam keadaan defisit sebesar Rp 39.155.453.492,00.

Besar kecilnya, maupun tinggi-rendahnya tuntutan akan kebutuhan terpenuhinya kebutuhan masyarakat di atas akan berdampak terhadap besar kecilnya aspek pembiayaan yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menutupi defisit anggaran tersebut.

Pada Tahun anggaran 2014, sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) sebagai salah satu sumber pembiayaan penerimaan APBD Tahun 2014 menjadi sumber yang dapat diandalkan untuk menutup defisit anggaran, peluang lain yang bisa dilakukan untuk menutupi pembiayaan dari pos penerimaan pembiayaan yaitu pinjaman dan/atau obligasi daerah saat ini dirasakan belum perlu dilakukan.

Pada pembiayaan daerah Tahun anggaran 2014, dialokasikan penerimaan SiLPA sebesar Rp 0,00 dengan realisasi Rp 295.915.369.899,00 dan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) pada PD BPR/BKPD/LPK untuk Badan Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp 2.000.000.000,00 dan PDAM sebesar Rp 1.000.000.000,00, sehingga dari Target sebesar Rp 136.229.575.104,00 terealisasi sebesar Rp 137.729.768.274 atau 101,10 persen. Untuk lebih jelasnya, target dan realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 dapat dilihat di Tabel 3.18 di bawah ini :

## B. Pembiayaan Daerah

**Tabel 3.18**  
**Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014**

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>136.229.575.104,00</b>	<b>137.729.768.274,00</b>	<b>101,10</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>149.229.575.104,00</b>	<b>149.579.664.051,00</b>	<b>100,23</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	149.229.575.104,00	149.579.664.051,00	100,23
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>13.000.000.000,00</b>	<b>11.849.895.777,00</b>	<b>91,15</b>
Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	1.849.895.777,00	61,66
Pembayaran Pokok Utang		-	-
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>295.915.39.899,00</b>	<b>-</b>

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya, 2014

SILPA pada Tahun 2014 mencapai Rp 295.915.369.899,00 merupakan sisa lebih yang berasal dari pelampauan pendapatan dan sisa anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak terserap dalam Tahun 2015 setelah dikurangi target pendapatan yang tidak tercapai.

Pelampauan pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) jenis Pajak Daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang syah, Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil pajak / bukan pajak.

Sisa anggaran belanja tidak terserap adalah belanja tidak langsung sebesar 88,63 % dan belanja langsung sebesar 92,18 % komponen belanja tidak langsung signifikan tidak direalisasikan pada belanja pegawai yaitu dana tunjangan profesi guru/ sertifikasi guru yang mengikuti ketentuan pemerintah pusat, penyediaan belanja pegawai bagi kategori 2 yang diangkat, yang jumlahnya tidak sesuai dengan asumsi yang telah disediakan, penyediaan belanja pegawai yang direncanakan



dilaksanakan pada bulan juni yang ditunda pelaksanaannya sehingga pembayarannya dimulai Tahun 2015, sedangkan pada belanja langsung SILPA berasal dari efisiensi pengadaan barang / jasa, kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena perubahan keputusan pemerintah pusat lainnya.

Sebagai gambaran umum terhadap ringkasan laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014 sebelum dilakukan pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat dilihat pada Tabel 3.19 di bawah ini :

**Tabel 3.19**  
**Ringkasan Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2.554.080.535.809,00</b>	<b>2.575.127.886.182,00</b>	<b>100,82</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>152.337.814.551,00</b>	<b>162.863.531.304,00</b>	<b>106,91</b>
Pajak Daerah	41.595.013.937,00	44.253.007.592,00	106,39
Retribusi Daerah	20.434.553.250,00	33.530.262.672,00	164,09
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	18.118.326.734,00	18.835.852.511,00	103,96
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	72.189.920.630,00	66.244.408.529,00	91,76
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.521.840.482.635,00</b>	<b>1.541.035.901.962,00</b>	<b>101,26</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	68.593.994.635,00	87.789.413.962,00	127,98
Dana Alokasi Umum	1.342.934.278.000,00	1.342.934.278.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	110.312.210.000,00	110.312.210.000,00	100,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>879.902.238.623,00</b>	<b>871.228.452.916,00</b>	<b>99,01</b>
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	82.513.372.623,00	90.983.601.513,00	110,27
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	411.137.653.000,00	411.137.653.000,00	100,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	386.251.213.000,00	369.107.198.403,00	95,56
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.690.310.110.913,00</b>	<b>2.416.942.284.557,00</b>	<b>89,84</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.775.566.702.261,80</b>	<b>1.573.709.384.898,00</b>	<b>88,63</b>
Belanja Pegawai	1.514.346.764.619,20	1.322.037.197.036,00	87,30
Belanja Hibah	143.561.790.000,00	141.725.000.000,00	98,72
Belanja Bantuan Sosial	13.260.500.000,00	8.963.200.000,00	67,59
Belanja Bagi Hasil KPD Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	7.346.245.680,60	7.070.872.640,00	96,25
Belanja Keuangan KPD Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	90.001.401.962,00	87.295.702.222,00	96,99

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi ( Rp)	%
Belanja Tidak Terduga	7.050.000.000,00	6.617.413.000,00	93,86
<b>Belanja Langsung</b>	<b>914.743.408.651,20</b>	<b>843.232.889.659,00</b>	<b>92,18</b>
Belanja Pegawai	76.107.736.649,00	67.675.413.000,00	88,92
Belanja Barang dan Jasa	240.238.125.327,00	217.060.458.240,00	90,35
Belanja Modal	598.397.546.675,20	558.496.505.928,00	93,33
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(136.229.575.104,00)</b>	<b>158.185.602.325,00</b>	
<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>136.229.575.104,00</b>	<b>137.729.768.274,00</b>	<b>101,10</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>149.229.575.104,00</b>	<b>149.579.664.051,00</b>	<b>100,23</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	149.229.575.104,00	149.579.664.051,00	100,23
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>13.000.000.000,00</b>	<b>11.849.895.777,00</b>	<b>91,15</b>
Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	1.849.895.777,00	61,66
Pembayaran Pokok Utang		-	-
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>295.915.369.899,00</b>	<b>-</b>

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya, 2014